

Latar Belakang

Pembangunan nasional di negara berkembang termasuk Indonesia, memprioritaskan pada pembangunan Ekonomi. Hal ini disebabkan karena di negara-negara berkembang masih mengalami permasalahan dalam bidang ekonomi. Selain itu pembangunan ekonomi akan mendukung dan merangsang pembaharuan dan perubahan dalam kehidupan lain di masyarakat ke arah yang lebih baik.

Sistem perencanaan pembangunan yang selama ini cenderung seragam, dewasa ini mulai berubah dan muncul berbagai bervariasi tergantung pada potensi dan permasalahan pokok yang di alami oleh daerah yang bersangkutan. Kebijakan pembangunan daerah yang selama ini hanya merupakan pendukung dari kebijakan nasional, mulai mengalami perubahan sesuai dengan keinginan dan aspirasi yang berkembang di daerah. Keadaan demikian menyebabkan, pola dan sistem perencanaan pembangunan dalam era otonomi juga mengalami perubahan cukup penting dibandingkan dengan apa yang telah kita alami dalam era sentralisasi pada pemerintahan orde baru yang lalu.

Sjafrizal mengemukakan bahwa :

perubahan yang terjadi pada dasarnya menyangkut dua hal pokok, yaitu : pertama, pemerintahan daerah diberikan kewenangan lebih besar dalam melakukan pengelolaan pembangunan (desentralisasi pembangunan). Kedua, pemerintah daerah diberikan sumber keuangan baru dan kewenangan pengelolaan keuangan yang lebih besar (desentralisasi fiskal).¹

Kedua hal pokok tersebut dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat lebih diberdayakan dan bisa melakukan kreasi dan terobosan baru dalam rangka mendorong proses pembangunan di daerahnya masing-masing sesuai dengan potensi dan aspirasi masyarakat yang bersangkutan. Tujuan dan sasaran utama penyusunan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

¹ Sjafrizal. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Cetakan ke-1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Hal. 35

adalah untuk menyesuaikan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang berlaku di Indonesia dengan prinsip pelaksanaan otonomi daerah tersebut.

Berkaitan dengan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan tersebut, agar pembangunan daerah berjalan secara efisien dan efektif, dan penyebaran manfaatnya merata keseluruh desa dan kelurahan, maka koordinasi dan keterpaduan menjadi kata kunci penting dalam sebuah pembangunan daerah. Koordinasi pembangunan di Indonesia secara sungguh-sungguh dimulai sejak orde baru, karena pada masa sebelumnya teknik perencanaan belum berkembang dengan baik.

Setiap daerah mempunyai perencanaan pembangunan jangka panjang dan pendek. Perencanaan jangka menengah (*medium-term planning*) biasanya mencakup waktu 4-5 tahun, tergantung dari masa jabatan presiden atau kepala daerah. Di Indonesia, perencanaan jangka menengah mempunyai jangka waktu 5 tahun yang disusun baik oleh pemerintah nasional maupun pemerintah daerah. Perencanaan jangka menengah pada dasarnya merupakan jabaran dari perencanaan jangka panjang sehingga bersifat lebih operasional. Perencanaan jangka panjang berisikan perumusan kerangka ekonomi makro, strategi, kebijakan dan program pembangunan yang disusun berdasarkan visi dan misi presiden atau kepala daerah terpilih. Di samping itu, perencanaan jangka menengah juga memuat sasaran dan target pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif supaya perencanaan tersebut menjadi lebih terukur dan mudah dijadikan sebagai dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi.

Salah satu badan yang mempunyai peran sangat penting dalam perencanaan pembangunan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang dibentuk di setiap daerah otonom, di mana badan inilah yang akan membantu kepala daerah dalam menentukan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah serta penilaian atas

pelaksanaannya. Hal ini merupakan peranan yang sangat penting dalam setiap perencanaan pembangunan setiap daerah.

Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Chandra Gustama, dengan Judul Skripsi “Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Di Kabupaten Kutai Timur” bahwa BAPPEDA masih memiliki masalah, terutama dalam sumber daya manusia dan penunjangnya. BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur di dalam proses pembangunan daerah juga sangat menentukan karena untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur secara fungsional berperan aktif sebagai perencanpengkoordinasi dan sekaligus sebagai pengendali pelaksanaan serta peneliti dan pengembangan pembangunan daerah, seperti RPJP, RPJM, dan Renstra SKP.²

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Cindy Ratu dengan judul penelitian “Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kota Manado” dengan hasil penelitian mengatakan bahwa BAPPEDA haruslah berperan aktif dalam menjalankan wewenangnya sebagai lembaga non departemen langsung dibawah koordinasi Walikota pengawasan internalnya ada pada Inspektorat, hal ini ditekankan mengingat pembangunan di Kota Manado dirasakan belum maksimal dan merata. Perencanaan pembangunan daerah haruslah di sokong dengan implementasi pemerintahan daerah yang merata dan berkesinambungan dengan arah pembangunan yang terencana dengan baik dan dinamis.³

Hal ini sesuai dengan mata kuliah teori-teori pembangunan dan Administrasi Pemerintahan Daerah, Administrasi Pembangunan, Perencanaan Pembangunan dan Manajemen

² Muhammad Chandra Gustama. *Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam Pembangunan Di Kabupaten Kutai Timur*. eJurnal Administrasi Negara. I, hal. 1

³ Cindy Ratu. 2013. *Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kota Manado*. Ejournal unstrat, hal. 1

Pembangunan daerah dimana dalam mata kuliah tersebut membahas secara rinci bagaimana perencanaan dan pengelolaan yang baik tentang pembangunan khususnya pembangunan daerah.

Di dalam melakukan pembangunan, setiap pemerintahan daerah memerlukan perencanaan yang akurat serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukan. Seiring dengan semakin pesatnya pembangunan bidang ekonomi, maka terjadi peningkatan permintaan data dan indikator-indikator pembangunan yang menghendaki ketersediaan data sampai tingkat kabupaten/kota. Data dan indikator-indikator pembangunan yang diperlukan adalah yang sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Kunci utama keberhasilan sebuah pembangunan terletak pada kualitas perencanaan pembangunan tersebut. Seorang pembuat rencana harus mampu untuk merumuskan pembangunan di berbagai sektor. Dengan demikian seorang pembuat rencana pembangunan dituntut untuk memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas dalam pembangunan sebuah daerah berdasar segala potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Sektor yang harus memperoleh perhatian dari seorang pembuat rencana mencakup sektor sumber daya alam yang terkandung di daerah tersebut, sektor sosial ekonomi serta sektor fisik dan infrastruktur.

Pada era manajemen strategis seperti sekarang ini, perencanaan di daerah harus didahului dengan penertapan visi terlebih dahulu. Kepala daerah memberikan visi pembangunan didepan DPRD, namun visi kepala daerah belum tentu akan menjadi visi pembangunan daerah otonom. Hal ini disebabkan DPRD yang menjadi wakil rakyat harus melihat apakah visi pembangunan yang direncanakan oleh kepala daerah sesuai dengan keadaan masyarakat dan didukung oleh sumber daya manusia yang baik atau tidak. Selain itu juga dampak pembangunan akan menguntungkan masyarakat luas atau hanya sebagian.

Setiap daerah mempunyai Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah, begitupun dengan Kabupaten Polewali Mandar. Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah di tangani langsung oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Polewali Mandar. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Kabupaten Polewali Mandar mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Sebagai lembaga teknis daerah di bidang perencanaan, BAPPEDA disamping menyusun dokumen perencanaan skala kabupaten juga berkewajiban menyusun dokumen perencanaan tingkat SKPD.

Rencana pembangunan di Polewali Mandar mengacu pada Visi Bupati Polewali Mandar yaitu “Terwujudnya Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan Menuju Polewali Mandar yang Sejahtera.”

Berdasarkan pengamatan awal menunjukkan bahwa peranan BAPPEDA dalam menyusun program pembangunan jangka menengah belum maksimal. Hal itu dapat dilihat dimana program-program yang telah dibuat tidak sejalan dengan visi misi bupati polewali mandar dimana dalam visinya disebutkan terwujudnya pembangunan yang merata dan berkeadilan menuju polewali mandar yang sejahtera. Namun yang terjadi di lapangan pembangunan yang dilakukan belum merata hal itu dapat dilihat dari masih banyaknya daerah-daerah yang belum tersentuh oleh pembangunan khususnya jalan, listrik dan pengairan. Dimana program itulah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Di Polewali Mandar masih terdapat desa yaitu desa Kurra yang tidak tersedia listrik sama sekali, warga hanya memakai lampu tradisional untuk membuat penerangan di rumahnya masing-masing, selain itu jalan untuk menuju desa tersebut sangat susah di jangkau dan masih dikhawatirkan terjadi longsor saat musim hujan tiba. Di Polewali Mandar juga terdapat desa

yaitu desa Limboro yang sangat pengairannya ada saat musim kemarau tiba desa tersebut akan kesulitan mendapat air bersih akhirnya kebanyakan warga akan mencoba membuat galian-galian kecil di pinggir sungai untuk memenuhi pasokan air bersih yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian, dengan judul ***“Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Polewali Mandar”***

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Peranan Badan Perencanaan Pembangunan daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Polewali Mandar. Maka dari itu, penulis dapat menyimpulkan dari hasil penelitian yaitu:

Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dilihat dari 4 aspek :

1. Koordinasi Pembangunan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sudah berjalan sesuai dengan baik dimana koordinasi yang terjalin antara BAPPEDA dengan SKPD ataupun masyarakat melahirkan suatu hubungan yang baik dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Polewali Mandar. Namun kurangnya pendampingan saat pelaksanaan Musrembang seringkali menyebabkan terganggunya koordinasi antara BAPPEDA dengan masyarakat. Tetapi secara garis besar sudah bisa dikatakan baik.
2. Dalam menjaga Integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pembangunan, ada tim khusus yang di bentuk langsung oleh Bupati dalam penyusunan RPJMD. Semua bagian di BAPPEDA terlibat dalam tim ini , karna Badan Perencanaan Pembangunan Daerah inilah yang akan

mengawal penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah mulai dari tahap awal sampai akhir.

3. BAPPEDA dalam menjaga Konsistensi rencana pembangunan sudah baik, karna pihak BAPPEDA menjaga kerja samanya dengan SKPD untuk bersama-sama mengoptimalkan penyusunan RPJMD. Selain menjaga kerja sama dengan seluruh SKPD, BAPPEDA juga rutin mengadakan rapat internal untuk mempererat kerja sama antara Bidang-bidang di BAPPEDA karna semua bidang-bidang di BAPPEDA saling membutuhkan dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

BAPPEDA memanfaatkan sumber dayanya dengan membuka konsultasi publik agar semua tokoh-tokoh dari masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Polewali Mandar, namun kurangnya pendampingan dari pihak BAPPEDA mengakibatkan kurang berjalan efektifnya kegiatan Musrembang tingkat desa.